

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dishutbun

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

- a. Masih luasnya lahan kritis di Kabupaten Cilacap sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan dan perlunya pengelolaan DAS secara terpadu dan multisektoral. Luas lahan kritis di Kabupaten Cilacap yaitu 142.812,12 Ha yang terdiri dari:
 - Lahan sangat kritis : 2.527,98 Ha
 - Lahan kritis : 15.340,27 Ha
 - Lahan agak kritis : 75.048,73 Ha
 - Lahan potensial kritis : 49.895,14 Ha
- b. Degradasi lahan yang terjadi akan menyebabkan meningkatnya erosi, sedimentasi, banjir, kerusakan tebing sungai dan lahan gundul. Upaya yang terus dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan penanaman berbagai jenis tanaman kehutanan (kayu-kayuan dan buah-buahan) dan tanaman perkebunan (karet, cengkeh, kopi, pala, dll) baik melalui dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga (PT. Pertamina, PT. Holcim, PT. Telkom, PT. PLN, Bank Jateng, dll), daerah yang menjadi prioritas adalah lahan kritis yang berada di daerah hulu atau daerah tangkapan air (*Catchment area*).
- c. Teritorial Lahan / batas - batas kawasan hutan maupun perkebunan negara dan swasta sering terjadi okupasi lahan oleh masyarakat sekitar sehingga sengketa lahan tersebut

dapat mempengaruhi keberadaan kawasan hutan maupun perkebunan negara maupun swasta. Hal yang perlu dilakukan adalah telah dilaksanakan rapat pembahasan tahap kedua oleh Tim Daerah dengan hasil kesepakatan bahwa penyelesaian kasus tukar menukar kawasan hutan akan dilakukan dengan dasar PETA TOP DAM yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan perlunya sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya hutan dengan kegiatan yang menyentuh masyarakat sekitar hutan antara lain dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan memberdayakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

- d. Kurangnya penghijauan pesisir pantai selatan sehingga masih terjadinya abrasi pantai. Upaya yang telah dan akan terus dilanjutkan adalah penghijauan pantai dengan tanaman nyamplung, cemara laut, ketapang, kelapa, dll.
- e. Kelangkaan kayu (potensi produksi jenis kayu yang laku di pasaran) dan belum semua industri memenuhi kewajiban pelaporan penatausahaan dikarenakan keterbatasan tenaga dan pengetahuan, untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan lebih mengaktifkan sosialisasi kepada para pengusaha kayu dan masyarakat, menganjurkan pertanaman kembali / reboisasi untuk perluasan penanaman. Disamping itu masih banyaknya industri primer hasil hutan kayu yang belum memiliki ijin usaha industri primer (IUIPHHK). Hal yang dilakukan adalah pendekatan kepada pemilik industri primer berupa pembinaan mengenai pentingnya legalitas usaha industri dalam hal ini industri primer hasil hutan kayu demi kelancaran usahanya.
- f. Terjadinya anomali musim, dimana musim kering yang lebih panjang dan musim hujan yang tidak menentu (datangnya hujan) sehingga mempengaruhi musim tanam dari bibit. Bibit tanaman tahunan (jati, albasia, karet, dll) masih dapat bertahan

dengan keadaan air tanah yang makin hari makin sedikit, sedangkan curah hujan belum tiba. Namun untuk tanaman semusim (nilam, dll) cukup rentan terhadap ketersediaan air tanah walaupun penanaman sudah masuk musim hujan. Menghadapi ketersediaan air tanah yang jauh dari mencukupi padahal sudah masuk musim tanam, untuk tanah di sekitar penanaman tanaman semusim khususnya diberikan mulsa atau penutup tanah untuk meminimalisir penguapan air.

- g. Masih kurangnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan pasca panen hasil produksi perkebunan karena petani memiliki keterbatasan dalam modal untuk pengadaan alat pasca panen, sehingga diharapkan untuk lebih sering memberikan sosialisasi dan pemberdayaan kepada kelompok dalam penggunaan teknologi.
- h. Masih kurangnya kualitas dan kualitas produk hasil kehutanan dan perkebunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017.

Visi dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017 dirumuskan dengan mengacu kepada visi Kepala daerah terpilih Kabupaten Cilacap periode 2012 – 2017 yakni **“Bekerja dan Berkarya menuju Cilacap Sejahtera”**, yang kemudian dinyatakan menjadi visi Kabupaten Cilacap 2012 – 2017 sebagai berikut : **“Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera secara Merata”**.

Untuk mencapai visi Kabupaten Cilacap tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap merumuskan 6 (enam) misi, sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Perwujudan demokratisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat enterpreneur, profesional, dan dinamis mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*;
3. Peningkatan dan perbaikan layanan pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat;
4. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, kehutanan kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja;
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama usaha ekonomi mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi, membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal;
6. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. Dalam rangka pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional serta pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan

untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagaimana diamanatkan dalam misi ke-4 dan ke-6 menjadi fokus perhatian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Pada misi ke-4 tersebut peran serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam memberikan pelayanan antara lain dengan melakukan pengembangan potensi lokal melalui fungsi kehutanan dan perkebunan.

Pada misi ke-6 peran serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan pelayanan dengan pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap 2011 – 2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan luas wilayah yang besar di Jawa Tengah yaitu 2.253,61 Km² atau 225.361 Ha yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan, mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sehingga selaras dengan struktur dan pola ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap tahun 2011 – 2031. RTRW Kabupaten Cilacap merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga perencanaan pembangunan daerah selaras dengan rencana penataan ruang daerah.

Sebagai implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cilacap maka diperlukan rencana program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Dengan demikian fokus program dan kegiatan kajian lingkungan hidup diarahkan kepada peningkatan usaha pertanian/perkebunan dengan orientasi tanaman pangan yang berdampak pada ketersediaan tanaman pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap.

Sedangkan implementasi KLHS bidang kehutanan yaitu dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kawasan Lindung serta Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lahan. Fokus program dan kegiatan diarahkan kepada perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan yang akan berdampak pada perlindungan terhadap areal terbuka dan areal resapan sehingga mampu menjaga sirkulasi udara dan siklus hidrologi di Kabupaten Cilacap, mengurangi degradasi lahan / lahan kritis serta kerusakan kawasan hutan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Permasalahan / tantangan yang dihadapi Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan saat ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Masih luasnya lahan kritis;
2. Masih terjadinya degradasi lahan;
3. Masih kurangnya pemanfaatan lahan;
4. Masih kurangnya penggunaan teknologi dalam pengolahan pasca panen;
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk kehutanan dan perkebunan;
6. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani.

Permasalahan lingkungan tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat atau mengancam keberlangsungan pembangunan. Untuk itu, aspek lingkungan perlu lebih dipertimbangkan dalam penyusunan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut diwujudkan dalam misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap yaitu melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien.